

ABSTRAK

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah atas jasa pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran, pencegahan kebakaran, dan penyelamatan bencana kebakaran yang digunakan dan dikelola oleh individu atau badan. Namun pada kenyataannya penerimaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung dari tahun 2020 hingga 2022 tidak mencapai target.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecukupan dan elastisitas dalam pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung, keadilan dalam pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung, dan kemampuan administrasi dalam pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori kriteria wajib dalam menilai keefektivitasan sebuah pemungutan pelayanan pendapatan dari Phaurela dan Emy (2017) yang terdapat tiga kriteria, yaitu (1) Kecukupan dan Elastisitas, (2) Keadilan, dan (3) Kemampuan Administrasi. Dari dimensi teori tersebut, peneliti menggunakan ketiga dimensi teori, Kecukupan dan Elastisitas, Keadilan, dan Kemampuan Administrasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dikaitkan dengan tiga kriteria yaitu kecukupan dan elastisitas, keadilan, dan kecukupan administrasi dinilai belum efektif. Kriteria kecukupan administrasi belum efektif karena dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan teknis yang sesuai dan belum mudah dilakukan dan mencapai target yang telah ditentukan. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam proses pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam dan ditemukan juga upaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut.

Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi, Diskar PB

ABSTRACT

Fire extinguisher inspection services are services provided by the local government for inspection and testing of fire extinguishers, fire prevention, and fire disaster rescue that are used and managed by individuals or entities. However, in reality, service receipts for inspection of fire extinguishers in the city of Bandung from 2020 to 2022 have not reached the target.

This study aims to determine the adequacy and elasticity in service revenue for fire extinguisher inspection in the city of Bandung, fairness in service income for inspection of fire extinguishers in the city of Bandung, and administrative capabilities in service income for inspection of fire extinguishers in the city of Bandung.

The theory used in this study is the theory of mandatory criteria in assessing the effectiveness of an income service collection from Phaurela and Emy (2017) in which there are three criteria, namely (1) Adequacy and Elasticity, (2) Fairness, and (3) Administrative Capability. From these theoretical dimensions, researchers used three theoretical dimensions, Adequacy and Elasticity, Fairness, and Administrative Capability.

In this study using qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, documentation, and literature study.

Based on the results of the study, it can be concluded that the management of fire extinguisher inspection revenue services associated with three criteria, namely adequacy and elasticity, fairness, and administrative adequacy is considered ineffective. Criteria for administrative adequacy are not yet effective because the implementation is not in accordance with the appropriate technical and not easy to do and reach the target that has been set. There are several obstacles that occur in the process of managing fire extinguisher inspection revenue services and efforts are also found to resolve these obstacles.

Keywords: Management, Retribution, PB Diskar